

LAPORAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman

LKj

TAHUN
2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul DI Yogyakarta Kode Pos 55713

Telp / Fax . (0274) 367310

Website: [https:// www.dpupkp.bantulkab.go.id](https://www.dpupkp.bantulkab.go.id) | Email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Kabupaten Bantul



Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

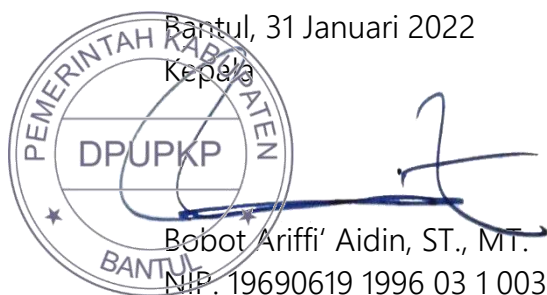
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, 31 Januari 2022
Kepala

Bobot Ariffi' Aidin, ST., MT.
NIP. 19690619 1996 03 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima IKU, disimpulkan bahwa kelima indikator berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 96,71%. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik.
3. Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani.
4. Persentase kecukupan air irigasi.
5. Persentase penanganan banjir.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang

ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima IKU, disimpulkan bahwa kelima indikator berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 96,71%. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik.
3. Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani.
4. Persentase kecukupan air irigasi.
5. Persentase penanganan banjir.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM.....	5
E. Isu Strategis.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	17
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
C. Akuntabilitas Anggaran	95
D. Efisiensi Sumber Daya	99
Bab IV Penutup	102

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2021	6
Tabel 2. Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021	6
Tabel 3. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP	7
Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja	12
Tabel 5. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Akhir Renstra	13
Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14
Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 8. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	18
Tabel 9. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	22
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	25
Tabel 12. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik	27
Tabel 13. Kondisi jalan Kabupaten Bantul per Desember 2021	28
Tabel 14. Data Pembebasan Tanah Bagi Pelebaran Jalan Cinomati	30
Tabel 15. Pendataan Leger Jalan Kabupaten Tahun 2021	31
Tabel 16. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2017 - 2021	32
Tabel 17. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tahun 2021	34
Tabel 18. Data Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tahun 2021	36
Tabel 19. Data Pemeliharaan Jembatan pada Jalan Kabupaten Tahun 2021	38
Tabel 20. Data peningkatan/rehabilitasi jalan desa Tahun 2021	41
Tabel 21. Data penerbitan IMB/PBG Tahun 2020-2021	47
Tabel 22. Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021	48
Tabel 23. Pelatihan tenaga Terampil Konstruksi Tahun 2021	50

Tabel 24. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kecukupan Air Irigasi.....	54
Tabel 25. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-	55
Tabel 26 Data Peningkatan Afvour Tahun 2021	57
Tabel 27 Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	61
Tabel 28 Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2021	61
Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	63
Tabel 30 Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2021	63
Tabel 31. Capaian Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2021.....	67
Tabel 32 Pendapatan Asli Daerah dari Rusunawa dan Pengolahan Limbah Cair Tahun 2017-2021	69
Tabel 33 Data Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Perumahan (Siteplan) Tahun 2021.....	71
Tabel 34 Data Penanganan RTLH Tahun 2021	75
Tabel 35 Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021.....	78
Tabel 36. Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Tahun 2021	79
Tabel 37 Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021	81
Tabel 38 Data Pembangunan Tangki Septik Pribadi Tahun 2021	84
Tabel 39 Data Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Tahun 2021	86
Tabel 40. Capaian Persentase Penanganan Banjir Tahun 2021	89
Tabel 41 Pemeliharaan Drainase Tahun 2021.....	91
Tabel 42 Data pembangunan sistem drainase lingkungan Tahun 2021.....	93
Tabel 43. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	97
Tabel 44 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	99
Tabel 45. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	101

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul.....	4
Gambar 2. Proses pembayaran ganti rugi tanah bagi pelebaran Jalan Cinomati yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Yogyakarta.....	30
Gambar 3. Akses jalan menuju Kawasan Industri Piyungan	33
Gambar 4. Peningkatan Jalan Jogoragan – Pleret di Kapanewon Banguntapan (Kiri), Peningkatan Jalan Jambean – Sambikerep di Kapanewon Kasihan (Kanan).....	36
Gambar 6. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bangunjiwo – Metes.....	38
Gambar 7. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Sindon.....	39
Gambar 8. Kegiatan Peningkatan Jalan Desa.....	43
Gambar 9. Rehabilitasi Pendopo Parasmya di Komplek Kantor Bupati Bantul.....	49
Gambar 10. Pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi Tahun 2021	51
Gambar 11. Proses pembangunan Afvour Karangmojo di Kapanewon Bantul	58
Gambar 12. Peta jaringan irigasi di Kabupaten Bantul	62
Gambar 13. Pemeliharaan saluran irigasi pada Daerah Irigasi Dokaran.....	65
Gambar 14. Kegiatan Survei Lokasi Pengajuan Ijin Siteplan di Salah Satu Perumahan.....	73
Gambar 15. Salah satu Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	76
Gambar 16. Peningkatan SPAM di Kalurahan Triharjo	79
Gambar 17. Pembangunan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Bawuran.....	80
Gambar 18. Pembangunan Tangki Septic Individu di Paten, Sumberagung, Jetis.....	84
Gambar 19. Pembangunan SPALD-T Permukiman di Kapanewon Trimulyo.....	87
Gambar 20. Pemeliharaan Drainase Lapangan Paseban di Kapanewon Bantul	92

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan

berisi :

- a. Latar Belakang*
- b. Pembentukan OPD*
- c. Susunan Organisasi*
- d. Keragaman SDM*
- e. Isu Strategis*

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. DPUPKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

B. Pembentukan OPD

DPUPKP merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPUPKP menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

C. Susunan Organisasi

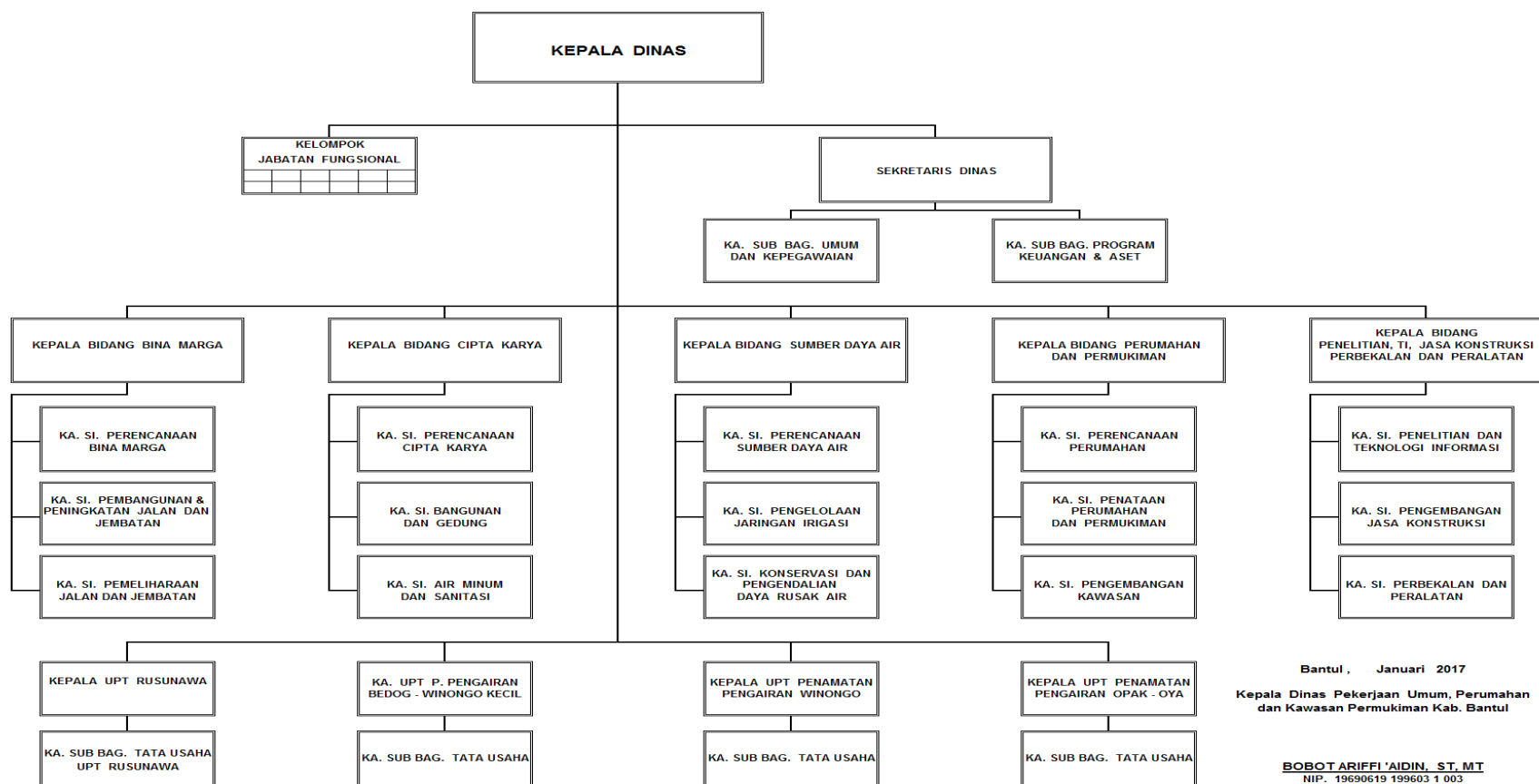
Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Sumber Daya Air;
6. Bidang Perumahan dan Permukiman;
7. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;
8. UPT; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas PUPKP dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
SESUAI PERDA KAB. BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016**



D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan survai lapangan, perencanaan DED, pengawasan pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan dokumen rencana, evaluasi dan laporan implementasi secara tepat dan cepat sesuai kurun waktunya. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 31 Desember 2021 ada 102 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2021

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan			
	Laki-laki	Wanita	I	II	III	IV
102	89	13	6	38	47	11

Sumber: DPUPKP, 2021

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan					
	SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2
102	6	8	4	4	18	19

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	28	4	13	10	1
Bidang Bina Marga	13	1	4	6	1
Bidang Cipta Karya	9	-	1	6	2
Bidang Sumber Daya Air	10	-	3	5	2
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	-	2	5	1
Bidang Lit,TI, Jakon dan Alkal	12	-	3	8	1
UPT Pengamatan Pengairan BWK	4	-	2	2	-
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	5	1	2	2	-
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	8	-	7	1	
UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	2	-	1	-	1
Arsiparis/JFT	2	-	1	1	-
Total	102	6	38	47	11

Sumber: DPUPKP, 2021

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPKP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PUPKP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan
4. Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana publik

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

a. Rencana Strategis

b. Perjanjian Kinerja

c. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dicanangkan, adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4: "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana".

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)
			Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)
		Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi (%)
		Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase kawasan kumuh (%) perkotaan yang tertangani
	Menciptakan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir (%)

Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2021 dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Satuan	Target Tahun 2021	Target Akhir 2021
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	76,08	76,08
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	84	84
2.	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi	%	83,16	83,16
3.	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	100	100
4.	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir	%	47,68	47,68

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi

bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana			
Mewujudkan layanan infrastruktur publik yang berkualitas dan memadai	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Penyelenggaraan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten	Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan
		Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah
	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Melaksanakan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi, dan pembangunan bangunan pelengkap	Peningkatan pelayanan kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalnya fungsi sarana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			bangunan pengairan
	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat	Penyelenggaraan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
Menciptakan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya penanganan banjir	Melakukan pengurangan resiko bencana melalui pemeliharaan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan sarana prasarana pengendali bencana	Perlindungan kawasan permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sektor strategis lainnya dari ancaman banjir

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- f. Program Pengembangan Permukiman
- g. Program Penataan Bangunan Gedung
- h. Program Penyelenggaraan Jalan
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- j. Program Pengembangan Perumahan
- k. Program Kawasan Permukiman

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
2	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi
3	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani
4	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir

Sumber: DPUPKP, 2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST., MT.
 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kabupaten Bantul
 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. SUHARSONO
 Jabatan : Bupati Bantul
 selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 11 Januari 2021

PIHAK KEDUA
 BUPATI BANTUL

 Drs. H. SUHARSONO

PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

 BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST., MT.
 NIP. 19690619 199603 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	76,08	Triwulan I	76,08
					Triwulan II	76,08
					Triwulan III	76,08
					Triwulan IV	76,08*)
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen	84	Triwulan I	84
					Triwulan II	84
					Triwulan III	84
					Triwulan IV	84*)
2.	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
3.	Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi	Persen	83,16	Triwulan I	83,16
					Triwulan II	83,16
					Triwulan III	83,16
					Triwulan IV	83,16*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir	Persen	47,68	Triwulan I	47,68
					Triwulan II	47,68
					Triwulan III	47,68
					Triwulan IV	47,68*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.859.800.368
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 28.358.307.515
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		
	Program Pengendalian Banjir		
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 11.585.675.240
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 7.137.924.540

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 5.214.135.043
4.	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Program Pengembangan Permukiman	Rp 31.724.737.019
5.	Program Pembangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 10.037.676.254
6.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 108.203.468.685
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong		
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 833.072.080
8.	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Rp 2.981.270.786
9.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Kawasan Permukiman	Rp 3.300.835.000
10.	Program pengelolaan areal pemakaman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 139.425.000
Jumlah Anggaran			Rp 225.376.327.530

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 11 Januari 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI



Drs. H. SUHARSONO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST., MT.
NIP. 19690619 199603 1 003

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 9. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Permukiman 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kecukupan air irigasi	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3.	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Kawasan Permukiman
4.	Meningkatnya penanganan banjir	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Sumber: DPUPKP, 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

- a. *Capaian Indikator Kinerja Utama*
- b. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- c. *Akuntabilitas Anggaran*
- d. *Efisiensi Sumberdaya*

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	75,42	76,08	75,66	99,45	76,08	99,45
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	84	84	84,5	100,6	84	100,6
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	80,01	83,16	81,05	97,46	83,16	97,46
4	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	92,49	100	92,49	92,49	100	92,49

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5	Persentase penanganan banjir (%)	40,9	47,68	44,6	93,54	47,68	93,54

Sumber : DPUPKP, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 96,71%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait diuraikan

1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Terdapat dua indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan sasaran ini yaitu persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik seperti pada tabel di bawah.

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	75,42	76,08	75,66	99,67	76,08	99,45
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	84	84	84,5	100,6	84	100,6

Sumber : DPUPKP, 2021

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 76,08%, realisasi sebesar 75,66%, tercapai 99,45% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan capaian

realisasi tahun sebelumnya sebesar 99,79% maka capaian tahun 2021 turun sebesar 0,34%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 76,08%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 99,45% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2021 sepanjang 472,49km atau 75,66% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 151,98km atau 24,34% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km. Sedangkan kondisi jalan perdesaan sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap.

Tabel 13. Kondisi jalan Kabupaten Bantul per Desember 2021

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	Aspal	624,47	472,49	75,66	151,98	24,34

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1). Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan agar fungsi jalan menjadi optimal. Indikator kinerja program ini adalah penanganan jalan kabupaten

dengan indikator program panjang jalan kabupaten tertangani. Anggaran program Penyelenggaraan Jalan adalah sebesar Rp82.128.407.747,- dengan realisasi Rp752.798.842.33,- atau 91,66%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jalan kabupaten dan meningkatkan kualitasnya. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp82.128.407.747,- dengan realisasi Rp752.798.842.33,- atau 91,66%. Target dan realisasi keluaran kegiatan ini adalah 100% Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten atau tercapai 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Cinomati. Target keluaran dari sb kegiatan ini adalah bidang tanah yang dibebaskan sejumlah 96 bidang dan terealisasi 85 bidang tanah yang dibebaskan. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp17.480.000,- terealisasi sebanyak Rp11.955.680.863,- atau terealisasi 68,40%

Pembebasan tanah bagi pelebaran jalan Cinomati ini dilaksanakan melalui pentahapan, dan tahun 2021 adalah tahap pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Yogyakarta. Data pembebasan lahan tersaji pada Tabel berikut ini :

Tabel 14 Data Pembebasan Tanah Bagi pelebaran Jalan Cinomati

No	Kalurahan	Jenis Lahan	Belum Dibayar			Pembayaran		
			Jumlah Bidang	Luas	Nilai (Rp)	Jumlah Bidang	Luas	Nilai (Rp)
1	Terong	Tanah Warga				28	6.020	3.931.096.100
		Tanah Kehutanan	3	6.207	2.458.128.200			
		Tanah Enklave	7	7.418	3.765.919.300			
2	Wonolelo	Tanah Warga	1	391	172.149.900	57	14.060	7.686.200.400
		Tanah Oo	2	2.130	1.235.046.300			
Jumlah			13	16.146	7.631.243.700	85	20.080	11.617.296.500



Gambar 2. Proses pembayaran ganti rugi tanah bagi pelebaran Jalan Cinomati yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Yogyakarta.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk mengelola leger jalan. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp175.000.000,- terealisasi sebesar Rp78.558.650,- atau tercapai sebesar 44,89%.

Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah laporan hasil penyusunan data leger jalan sebanyak 1 dokumen, atau tercapai 100%. Pendataan leger jalan tercantum pada table berikut :

Tabel 15 Pendataan Leger Jalan Kabupaten Tahun 2021

No	Nama dan Nomor Ruas Jalan Kabupaten	Kapanewon	Panjang (m)
1	Jl. Simpang Bejen - Kweden (K.205)	Bantul	841
2	Jl. Trirenggo - Nogosari (K.208)	Bantul	580
3	Jl. Manding - Simpang Manding (K.198)	Bantul	673

- Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data kondisi jalan dan jembatan pada jalan kabupaten. Pagu anggaran sebesar Rp707.422.800,- terealisasi sebanyak Rp284.285.000,- atau terealisasi sebanyak 40,19%. Target keluaran sub kegiatan ini adalah 4 paket dokumen update kondisi jalan dan jembatan, tapi hanya terealisasi 3 dokumen. Data Kondisi jalan kabupaten Tahun 2017-2021 tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 16 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2017 - 2021

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2017	624,47	463,23	74,18	161,24	25,82
2018	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	25,08
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	473,51	75,83	151,59	24,27

Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses menuju Kawasan Industri Piyungan melalui pembangunan jalan dan jembatan menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 40 milyar dengan realisasi Rp39.937.217.150,- (98,78%). Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah terbangunnya akses jalan dan jembatan menuju Kawasan Industri Piyungan di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan sepanjang 736m, dan terealisasi 100%.



Gambar 3. Akses jalan menuju Kawasan Industri Piyungan

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas jalan melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan kabupaten. Pagu anggaran sebesar Rp19.423.975.920,- terealisasi Rp18.825.962.770,- atau terealisasi sebesar 96,92%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten sebanyak 45 ruas. Data ruas jalan kabupaten yang mengalami peningkatan/rehabilitasi pada Tahun 2021 tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 17 Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Panjang Penanganan (km)
1	Drainase Jalan Bejen – Kweden	Bantul	0.146
2	Drainase Jalan Sapuangin - Sanden K.98	Sanden	0.146
3	Gorong-gorong Jalan Bandung – Puron	Srandakan	0.048
4	Gorong-gorong Jalan Celep - Donotirto K.220	Kretek	0.008
5	Jalan Caturharjo – Bambanglipuro	Pandak	0.140
6	Jalan Dlingo – Kebosungu	Dlingo	0.200
7	Jalan Dlingo – Pokoh	Dlingo	0.250
8	Jalan Gelangan – Bakulan	Bantul	0.175
9	Jalan Kalirandu – Beji	Kasihan	0.078
10	Jalan Karangtengah – Mojolegi	Imogiri	0.200
11	Jalan Kasihan - Batas Kabupaten Sleman	Kasihan	0.195
12	Jalan Miri – Gaten	Bantul	0.125
13	Jalan Ngentak – Diro	Sewon	0.235
14	Jalan Payak – Klenggotan	Piyungan	0.122
15	Jalan Petir - Oro oro	Piyungan	0.122
16	Jalan Petung - Kali Kramat	Kasihan	0.210
17	Jalan Sindet – Plencing	Imogiri	0.525
18	Jalan Srandakan – Mangiran	Srandakan	0.225
19	Jalan Tarudan – Timbulharjo	Sewon	0.147
20	Talud Jalan Kasihan – Bangunjiwo	Kasihan	0.088
21	Talud Jalan Kuwiran – Pajangan	Pajangan	0.066
22	Drainase Jalan Ngangkruk – Pelemwulung	Banguntapan	0.138
23	Drainase Jalan Padokan – Nitiprayan	Kasihan	0.135
24	Drainase Jalan Simpang Glebagan - Tlogo Lor	Kasihan	0.138
25	Jalan Jambean – Sambikerep	Kasihan	3.635

No	Uraian	Kapanewon	Panjang Penanganan (km)
26	Jalan Jebugan – Perumahan	Bantul	0.059
27	Jalan Jogoragan – Pleret	Pleret	2.100
28	Jalan Kweni – Glugo	Sewon	0.210
29	Jalan Salakan – Jotawang	Sewon	0.194
30	Jalan Simpang Paseban – Ringinharjo	Bantul	0.084
31	Talud Jalan Gangin – Ngebel	Kasihan	0.225
32	Drainase Jalan Tembi – Sudimoro	Sewon	0.149
33	Gorong-gorong Jalan Salaman – Pundung	Imogiri	0.0045
34	Jalan Dingkikan – Kagrokan	Sedayu	0.159
35	Jalan Jetis/Kasihan – Karangjati	Kasihan	0.197
36	Jalan Kasongan – Kembaran	Kasihan	0.175
37	Jalan Pijenan – Guwosari	Pajangan	0.111
38	Jalan Sambeng - Gadingsari	Sanden	0.177
39	Talud Bangunjiwo - Metes	Kasihan	0.098
40	Jalan Kaliputih - Ngireng-ireng	Sewon	0.097
41	Jalan Krebet – Jojoran	Pajangan	0.073
42	Jalan Munggur – Payak	Piyungan	0.046
43	Jalan Sorowajan – Randubelang	Sewon	0.120
44	Jalan Turi – Kepek	Jetis	0.219
45	Talud Jalan Teruman – Ngentak	Bantul	0.105



Gambar 4. Peningkatan Jalan Jogoragan – Pleret di Kapanewon Banguntapan (Kiri), Peningkatan Jalan Jambean – Sambikerep di Kapanewon Kasihan (Kanan)

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas jalan melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten. Pagu anggaran sebesar Rp4.138.939.777,- terealisasi sebesar Rp3.999.912.600,- atau terealisasi sebesar 96,64%. Target keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan jalan kabupaten sebanyak 23 dan tercapai sebanyak 22 ruas. Data ruas jalan kabupaten yang dipelihara pada Tahun 2021 tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 18 Data Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Panjang Pemeliharaan (km)
1	Jalan Bangunjiwo-Metes	Kasihan	5.19
2	Jalan Gangin-Ngebel	Kasihan	1.79
3	Jalan Ganjuran-Patalan	Pundong	3.74
4	Jalan Gejlik Pitu-Talkondo	Srandakan	2.94

No	Uraian	Kapanewon	Panjang Pemeliharaan (km)
5	Jalan Gose-Manding	Bantul	2.32
6	Jalan Karangkajen-Wojo	Sewon	1.11
7	Jalan Kasihan-Bangunjiwo	Kasihan	3.02
8	Jalan Kuwiran-Pajangan	Pajangan	6.13
9	Jalan Kweden-Karangasem	Bantul	1.79
10	Jalan Manding-Simpang Manding	Bantul	0.66
11	Jalan Mangunan-Terong	Dlingo	7.14
12	Jalan Munthuk-Terong	Dlingo	4.10
13	Jalan Padokan-Kasihan (Sumberan)	Kasihan	1.95
14	Jalan Pedes-Metes	Sedayu	2.28
15	Jalan PLN Pedes-Metes	Sedayu	2.23
16	Jalan Strategis Wilayah Barat	Kasihan	7.46
17	Jalan Strategis Wilayah Tengah	Bantul	5.21
18	Jalan Strategis Wilayah Timur	Banguntapan	12.33
19	Jalan Tembi-Sudimoro	Sewon	2.58
20	Jalan Trirenggo-Nogosari	Bantul	0.59
21	Jalan Wiyoro-Pelem	Banguntapan	1.76
22	Jalan Wojo-Barongan	Sewon	8.54



Gambar 5. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bangunjiwo – Metes

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas jembatan pada jalan kabupaten melalui rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan pada jalan kabupaten. Pagu anggaran sebesar Rp203.069.250,- terealisasi Rp198.267.200,- atau sebesar 97,64%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah pemeliharaan jembatan pada 21 lokasi. Data jembatan yang dipelihara pada Tahun 2021 tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 19 Data Pemeliharaan Jembatan pada Jalan Kabupaten Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Panjang Pemeliharaan (km)
1	Jembatan Tegaldowo	Bantul	60
2	Jembatan Nambangan	Pundong	120
3	Jembatan Ngampon	Piyungan	60
4	Jembatan Belik	Pleret	10
5	Jembatan Ngablak	Piyungan	31

No	Uraian	Kapanewon	Panjang Pemeliharaan (km)
6	Jembatan Kembanggede	Pajangan	31
7	Jembatan Manding	Bantul	20
8	Jembatan Nitiprayan	Kasihan	15.5
9	Jembatan Ambarbinangun	Kasihan	16
10	Jembatan Sidorejo	Kasihan	12
11	Jembatan Gejlik Pitu I	Sanden	10
12	Jembatan Cemplung	Kasihan	33
13	Jembatan Sorok	Bambanglipuro	21
14	Jembatan Sindon	Pajangan	31
15	Jembatan Kentolan I	Pajangan	6
16	Jembatan Kentolan II	Pajangan	6
17	Jembatan Kanggotan	Pleret	15
18	Jembatan Miri	Sewon	20
19	Jembatan Pacar	Jetis	20
20	Jembatan Kaliputih	Sewon	17
21	Jembatan Sembungan	Kasihan	11



Gambar 6. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Sindon

2) Program Pengembangan Permukiman

Maksud dari program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam pengembangan permukiman. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas prasarana lingkungan permukiman berupa jalan desa. Anggaran program Pengembangan Permukiman adalah sebesar Rp13.752.079.480,- dengan realisasi Rp13.418.193.259,- atau 97,57%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman berupa jalan desa. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp13.752.079.480,- dengan realisasi Rp13.418.193.259,- atau 97,57%. Target dan keluaran berupa capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur perdesaan sebesar 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) subkegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk membangun infrastruktur jalan desa pada permukiman dalam rangka mendukung akses masyarakat ke pusat perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Pagu anggaran sebesar Rp13.752.079.480,- dengan realisasi Rp13.418.193.259,- atau 97,57%. Target dan keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 57 ruas jalan desa

ditingkatkan/direhabilitasi atau tercapai 100%. Data peningkatan/rehabilitasi jalan desa tersaji pada table berikut :

Tabel 20 Data peningkatan/rehabilitasi jalan desa Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Panjang (m)
1	Jalan Bantul Karang - Jetak	Bantul	350
2	Jalan Bibis - Kaliasem	Kasihan	131
3	Jalan Cepokojajar - Ngampon	Piyungan	118
4	Jalan Kuwon - Nglorong	Kretek	131
5	Jalan Mayungan - Piring	Sanden	161
6	Jalan Mojohuro - Demi	Imogiri	131
7	Jalan Padokan - Jomegatan	Kasihan	121
8	Jalan Rajangan - Dadabong	Pajangan	125
9	Jalan Soboman - Kersan	Kasihan	131
10	Jalan Trirenggo - Trirenggo	Bantul	146
11	Jalan Triwidadi - Beji Kulon	Pajangan	145
12	Talud Jalan Trukan - Pelemadu	Imogiri	193
13	Drainase Jalan Nitiprayan - Jomegatan	Kasihan	39
14	Drainase Jalan Terong Lor - Terong Kidul	Dlingo	714
15	Jalan Batas Kodya - Pelem Wulung	Banguntapan	57
16	Jalan Bobok - Kategoan	Jetis	130
17	Jalan Dongkelan - Jomegatan	Kasihan	114
18	Jalan Guwosari - Pringgading	Pajangan	95
19	Jalan Jetis - Jonggalan	Jetis	125
20	Jalan Kalimanjung - Batas Kab. Sleman	Kasihan	125
21	Jalan Karangasem - Mangunan	Dlingo	72
22	Jalan Kayuhan Kulon - Angin Angin	Pajangan	125
23	Jalan Kurahan - Gejlik Pitu	Sanden	63
24	Jalan Kuroboyoy - Ciren	Pandak	121
25	Jalan Nanggulan - Klagaran	Sanden	125
26	Jalan Nglampengan - Lo Putih	Dlingo	75
27	Jalan Nglembu - Jetis	Jetis	125
28	Jalan Paduresan - Pundung	Imogiri	114
29	Jalan Pleret - Kanggotan	Pleret	95

No	Uraian	Kapanewon	Panjang (m)
30	Jalan Plumutan - Bregan	Bambanglipuro	125
31	Jalan Pucung - Bojong	Imogiri	125
32	Jalan Salakan - Salakan	Sewom	101
33	Jalan Surobayan - Kaliberot	Sedayu	132
34	Jalan Trisigan 1 - Dagan D.171	Sanden	210
35	Jalan Winongo Glondong - Tirtonirmolo	Kasihani	125
36	Jalan Panggang KedungDengkeng	Sedayu	125
37	Jalan Panggang - Kemusuk Kidul	Sedayu	227
38	Talud Jalan Kalangan - Karang	Kretek	69
39	Talud Jalan Nglebak - Kauman	Pandak	1015
40	Talud Jalan Pacar - Trimulyo	Jetis	69
41	Gorong-gorong Jalan Niten - Pendowo	Sewon	8
42	Jalan Bracan - Mulekan	Kretek	98
43	Jalan Girirejo - Dronco	Imogiri	394
44	Jalan Gunung Tambalan - Ketandan	Pandak	146
45	Jalan Kepuh Wetan (Kepuh Lor - Kepuh Wetan) D.380	Banguntapan	394
46	Jalan Ketalo - Gunturgeni	Srandakan	127
47	Jalan Keyongan Lor - Keyongan Lor	Bantul	131
48	Jalan Koripan I - Dlingo D.567	Dlingo	131
49	Jalan Korowelang - Mangiran	Srandakan	98
50	Jalan Ngajaran - Ciren	Pandak	161
51	Jalan Ngingas - Panggang	Sedayu	169
52	Jalan Panjangjiwo - Sulang Lor	Jetis	162
53	Jalan Prangwedanan - Potorono	Banguntapan	104
54	Jalan Pranti - Cubung	Jetis	385
55	Jalan Pringgading - Kalinongko	Pajangan	98
56	Jalan Sriharjo - Sriharjo	Imogiri	177
57	Jalan Sumberan - Ngentak	Sedayu	197



Gambar 7. Kegiatan Peningkatan Jalan Desa



Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 84%, realisasi sebesar 84,5%, tercapai 100,6% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian ini naik 0,6% dari capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 100%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 84%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100,6% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Dari 53 (lima puluh tiga) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator terdapat 9 (sembilan) gedung dengan kondisi sedang dan 44 (empat puluh empat) atau 84,5% gedung kantor dengan kondisi baik. Dengan terjaganya kondisi gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Pencapaian sasaran pada indikator ini didukung oleh program sebagai berikut :

1) Program Penataan Bangunan Gedung

Maksud dari program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam penataan bangunan gedung. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas bangunan Gedung. Anggaran program Penataan bangunan Gedung adalah sebesar Rp10.228.431.254,- dengan realisasi Rp9.911.557.360,- atau 96,90%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan bangunan Gedung serta peningkatan koordinasi pada penerbitan IMB dan SLF bangunan Gedung. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp10.228.431.254,- dengan realisasi R9.911.557.360,- atau 96,90%. Target dan realisasi keluaran berupa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebesar 100% atau tercapai 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) subkegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam penyelenggaraan penerbitan IMB, SLF, peran TABG, pendataan bangunan Gedung dan implementasi IMB.

Dalam mendirikan bangunan Gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung.

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp84.948.120,- terealisasi sebanyak Rp83.982.620,- atau tercapai 98,86%. Target keluaran yang

dihasilkan dari subkegiatan ini adalah pembayaran Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) sebanyak 4 orang selama 6 bulan, data teknis bangunan Gedung sebanyak 12 dokumen dan penerbitan IMG/PBG. Realisasi fisik berupa pembayaran 4 orang TABG dan data teknis bangunan Gedung sebanyak 12 dokumen. Data penerbitan IMB/PBG Tahun 2020-2021 tersaji pada table berikut :

Tabel 21 Data penerbitan IMB/PBG Tahun 2020-2021

Tahun	IMB			PBG
	Gedung	Non Gedung	RTLH	
2020	1.652	107	n/a	n/a
2021	2.096	129	54	2

- Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk optimaliasi kinerja dalam proses perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan Gedung di Kabupaten Bantul.

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp10.143.483.134,- terealisasi sebesar Rp9.827.574.740,- atau tercapai 96,89%. Target keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Gedung pemerintah yang dibangun sebanyak 9 unit, perencanaan teknis bangunan gedung sebanyak 5 dokumen, dan data teknis bangunan gedung sebanyak 12 dokumen. Realisasi fisik sebesar 100% semua pada semua target indicator. Gedung pemerintah yang dibangun pada Tahun 2021 tersaji pada table berikut :

Tabel 22 Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Nama Bangunan Gedung	Kapanewon	Keterangan
1	Atap PTS – 3	Banguntapan	
2	Gedung Induk (Ramah Difabel)	Bantul	
3	Pendopo Parasamya	Bantul	
4	Gedung Kantor Dekranasda	Bantul	
5	Gedung Kantor DPUPKP	Bantul	
6	Landscape Kantor DPUPKP	Bantul	
7	Pembangunan Aula Kodim	Bantul	Diserahkan kepada Korem 072/Pamungkas
8	Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan	Bantul	Diserahkan kepada Kejari Bantul
9	Rehabilitasi Gedung Kantor Polres	Bantul	Diserahkan kepada Polres Bantul



Gambar 8. Rehabilitasi Pendopo Parasmya di Komplek Kantor Bupati Bantul

2) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Maksud dari program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kinerja usaha jasa konstruksi di Kabupaten Bantul. Anggaran program Pengembangan Jasa Konstruksi adalah sebesar Rp718.564.840,- dengan realisasi Rp633.266.580,- atau 88,13%.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga terampil konstruksi melalui pelatihan teknis konstruksi. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp492.205.120,- dengan realisasi Rp437.993.620,- atau 88,99%. Target dan realisasi fisik kegiatan ini adalah 100% Capaian kinerja

penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, atau tercapai 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (tujuh) subkegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tenaga terampil konstruksi. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp492.205.120,- dan terealisasi sebanyak Rp437.993.620,- atau terealisasi sebesar 88,99%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil pelatihan tenaga terampil konstruksi sebanyak 5 dokumen, atau tercapai 100%. Pelatihan tenaga terampil konstruksi dilaksanakan melalui 5 angkatan. Data pelatihan tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 23 Pelatihan tenaga Terampil Konstruksi Tahun 2021

Angkatan	Tanggal	Lokasi	Jumlah peserta	Jumlah peserta lulus sertifikasi
I	08 - 10 Juni 2021	Kalurahan Wukirsari	30	28
II	15 - 17 Juni 2021	Kalurahan Triharjo	30	30
III	21 - 23 September 2021	Kalurahan Poncosari	30	30
IV	05 - 07 Oktober 2021	Kalurahan Patalan	30	30
V	12 - 14 Oktober 2021	Kalurahan Sumbermulyo	30	30



Gambar 9. Pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi Tahun 2021

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan konstruksi. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp132.625.000,- dan terealisasi Rp129.475.500,- atau terealisasi 97,63%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi sebanyak 1 dokumen dan tercapai 100%.

- b) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp226.359.720,- dengan realisasi Rp195.272.960,- atau 86,27%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa

Konstruksi.

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi yang dalam hal ini adalah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp226.359.720,- dengan realisasi Rp195.272.960,- atau 86,27%. Keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah terlaksananya operasional SIPJAKI dalam 12 bulan.



DI Karangploso
-7,85206, 110,42602, 226°

2. Sasaran 2: Meningkatnya kecukupan air irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat diantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman. Indikator kinerja sasaran ini adalah:

Persentase kecukupan air irigasi

Kinerja dari indikator ini untuk mengukur luas daerah irigasi yang dapat terairi dengan baik dibagi jumlah luas daerah irigasi x 100%. Capaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 24. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kecukupan Air Irigasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap p 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kecukupan air irigasi (%)	80,01	83,16	81,05	97,46	83,16	97,46

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 83,16%, realisasi sebesar 81,05%, tercapai 97,46% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 96,79% maka capaian tahun 2021 naik sebesar 0,67%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 83,16%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 97,46% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Target kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 83,16% (7.180,03Ha) dan terealisasi sebesar 81,05% (6.997,86Ha) atau tercapai sebesar 97,46%. Data target dan capaian DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 25. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2021

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16
2018	7.050,52	81,16	6.945,19	80,44
2019	7.093,69	82,16	7.096,28	82,19
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81,05

Sumber: DPUPKP, 2021

Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Maksud program ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air (SDA). Pagu anggaran program ini adalah Rp.20.020.532.616,- terealisasi sebesar Rp.18.834.014.545,- atau mencapai 94,07%. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk optimalisasi kinerja pengelolaan SDA. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.358.644.099,- terealisasi sebesar Rp6.875.493.800,- atau tercapai 93,33%. Target indikator kegiatan ini adalah capaian kinerja pengelolaan sumber daya air sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%.

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Maksud dan tujuan dari subkegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan embung sebanyak 1 dokumen dengan realisasi berupa Laporan Hasil Perencanaan Teknis Embung sebanyak 1 dokumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp50.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp49.767.000,- atau terealisasi 98,16%.
- Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk membangun tanggul sungai dalam rangka pengamanan tanggul sungai/saluran pembuang irigasi agar tidak menyebabkan air meluap dan

menimbulkan banjir. Pagu anggaran sebanyak Rp6.368.615.000 dengan realisasi Rp5.960.174.800,- atau terealisasi sebesar 93,59%.

Target indicator sub kegiatan ini adalah saluran pembuang irigasi (afvour) yang dibangun atau ditingkatkan sebanyak 35 unit dan tercapai sebanyak 35 unit. Data afvour yang ditingkatkan pada Tahun 2021 tersaji pada table berikut :

Tabel 26 Data Peningkatan Afvour Tahun 2021

No	Nama Afvour	Lokasi
1	Afvour Bracan Tirtomulyo	Kretek
2	Afvour Kersan Tirtonirmolo	Kretek
3	Afvour Pendowoharjo	Sewon
4	Afvour Prancak Panggungharjo	Sewon
5	Afvour Sutran Sabdodadi	Bantul
6	Afvour Kedungpring Bawuran	Pleret
7	Afvour Kanoman Girirejo	Imogiri
8	Afvour Karangmojo	Bantul
9	Afvour Lanteng	Dlingo
10	Afvour Lemah Bang Mangunan	Dlingo
11	Afvour Mredo	Sewon
12	Afvour Ngalih	Dlingo
13	Afvour Ngentak Dadapan	Bambanglipuro
14	Afvour Nitipuran	Kasihan
15	Afvour Sindet	Imogiri
16	Afvour Sumberbatikan	Bantul
17	Afvour Tepus	Dlingo
18	Afvour Karanggede	Pandak
19	Afvour Kembangan	Bambanglipuro
20	Afvour Krekah	Pandak
21	Afvour Purworejo Wonolelo	Pleret
22	Afvour Sarang	Pundong
23	Afvour Segoroyoso	Pleret
24	Afvour Tegalrejo Bawuran	Pleret
25	Afvour Trayeman Pleret	Pleret
26	Afvour Banyak II	Pleret
27	Afvour Deresan	Bantul

No	Nama Afvour	Lokasi
28	Afvour Gunungan	Bambanglipuro
29	Afvour Bakungan Mulyodadi	Bambanglipuro
30	Afvour Bandut Lor	Sedayu
31	Afvour Bobok Tempel	Pundong
32	Afvour Cepoko	Bambanglipuro
33	Afvour Dung Biru	Bambanglipuro
34	Afvour Pranti II	Piyungan
35	Afvour Tekekan	Pundong



Gambar 10. Proses pembangunan Afvour Karangmojo di Kapanewon Bantul

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk melakukan rehabilitasi bangunan dengan target output berupa 1 unit konstruksi perkuatan tebing sungai yang dibangun, teralisasi berupa 1 unit konstruksi perkuatan Tebing Sungai Celeng Wukirsari. Pagu anggaran sebesar Rp608.984.257,- dengan realisasi Rp573.703.000,- atau terealisasi sebesar 94,21%.

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk melakukan operasional dan pemeliharaan sumur bor dengan target output berupa pemeliharaan sumur bor sebanyak 2 unit, dan terealisasi 2 unit sumur bor yang dipelihara. Pagu anggaran sebesar Rp55.546.842,- dengan realisasi sebesar Rp51.451.000,- atau terealisasi sebesar 92,63%.

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air (SDA), dengan target indikator berupa rambu larangan dan papan informasi pengelolaan SDA yang dipasang sebanyak 20 unit dan laporan hasil sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya air sebanyak 22 dokumen.

Realisasi fisik terpasang 20 unit rambu larangan dan papan informasi atau teralisasi 100% serta 22 dokumen laporan hasil sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya air atau terealisasi 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp274.798.000,- dengan realisasi Rp240.398.000,- atau terealisasi 87,48%.

- b) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah

1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini adalah untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp12.661.888.517,- dengan realisasi sebesar Rp11.958.520.745,- atau teralisasi sebesar 94,45%. Target indikator dari kegiatan ini adalah capaian kinerja pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 subkegiatan dengan keluaran masing-masing sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana teknis untuk konstruksi irigasi. Target keluaran 12 dokumen data teknis rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi dan 12 dokumen data perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi. Realisasi fisik dapat tercapai sebanyak 12 dokumen data teknis rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi (terealisasi 100%) dan 12 dokumen data perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi (terealisasi 100%). Pagu anggaran sebesar Rp164.385.720,- dengan realisasi sebesar Rp144.138.720,- atau terealisasi sebesar 87,68%.

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp11.267.905.289,- dengan realisasi Rp10.669.205.305,- atau terealisasi sebesar 94,69%. Target dan realisasi keluaran pada subkegiatan ini tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 27 Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

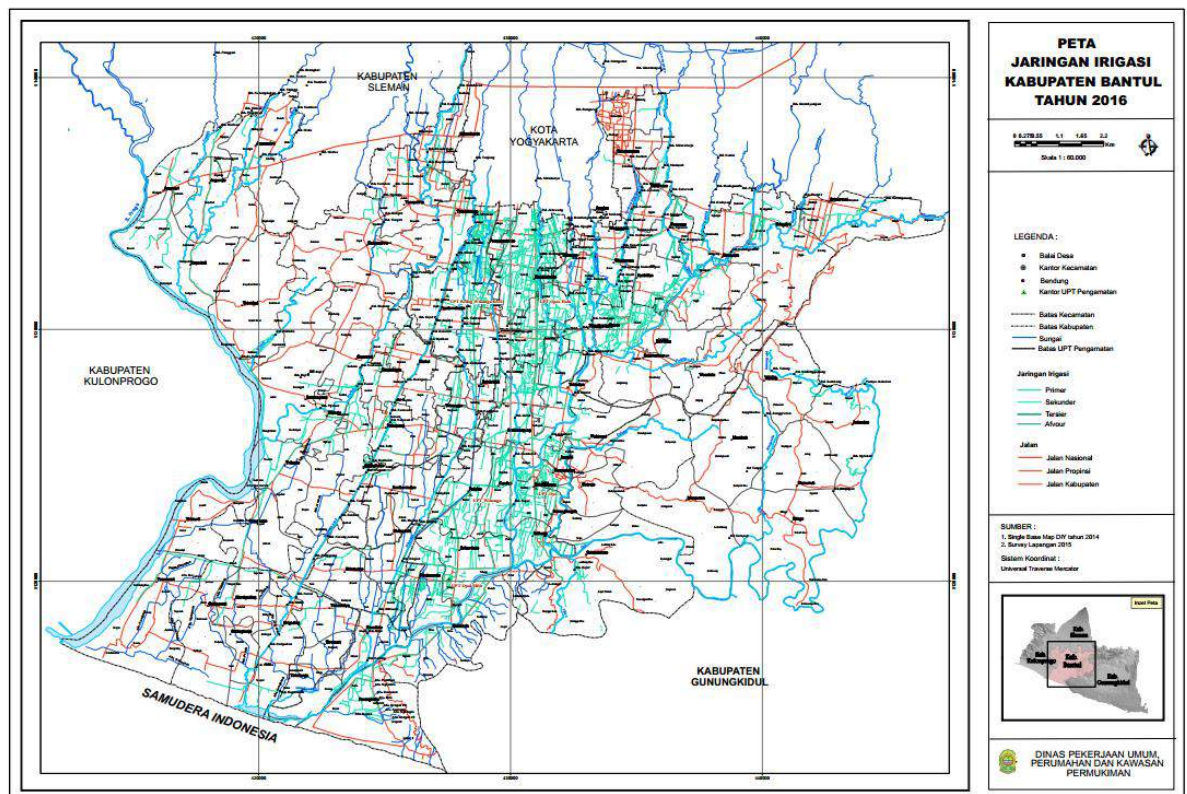
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi	15 unit	15 unit	100%
2	Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air	12 dokumen	12 dokumen	100%
3	Laporan perawatan kendaraan Operasional	12 dokumen	12 dokumen	100%
4	Laporan Perawatan kendaraan Alat Berat	12 dokumen	12 dokumen	100%
5	Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air	12 dokumen	12 dokumen	100%

Data Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2021 seperti pada Tabel :

Tabel 28 Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2021

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi
1	Daerah Irigasi Sono	Kretek
2	Daerah Irigasi Kembang	Dlingo
3	Daerah Irigasi Nawungan	Imogiri
4	Daerah Irigasi Sambeng	Dlingo
5	Daerah Irigasi Kadisono	Pandak
6	Daerah Irigasi Canden Kanan	Canden
7	Daerah Irigasi Jotawang Kanan	Sewon
8	Daerah Irigasi Salakan	Banguntapan
9	Daerah Irigasi Tegal Kanan	Pundong
10	Daerah Irigasi Klegen	Pundong
11	Daerah Irigasi Canden	Canden
12	Daerah Irigasi Ewon	Pandak
13	Daerah Irigasi Gempolan	Bantul

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi
14	Daerah Irigasi Karangploso	Piyungan
15	Daerah Irigasi Merdiko	Sewon



Gambar 11. Peta jaringan irigasi di Kabupaten Bantul

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas jaringan irigasi permukaan melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Pagu anggaran sebesar Rp1.229.597.508,- dengan realisasi Rp1.145.176.720,- atau terealisasi sebesar 93,13%.

Target dan realisasi indikator keluaran dari sub kegiatan ini tercantum pada table berikut :

Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	180 dokumen	180 dokumen	100%
2	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	18 jenis	18 jenis	100%
3	Laporan Pekerjaan Saluran	12 dokumen	12 dokumen	100%
4	Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	9 jenis	9 jenis	100%
5	BBM Solar Pompa Air	4.200 liter	4.200 liter	100%
6	Oli Pintu Air	35 kaleng	35 Aleng	

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi berupa gali sedimen, pembersihan rumput dan tanaman liar pada saluran irigasi:

Tabel 30 Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon
1	Afvoir Ngetuk	Pundong
2	DI. Canden kiri	Imogiri
3	Afvoir Ngetuk	Pundong
4	DI. Kadisono	Pandak
5	Afvoir Kembangan	Bambanglipuro
6	DI. Merdiko	Sewon
7	Afvoir Kadibeso	Jetis
8	DI. Bayem	Kasih

No	Uraian	Kapanewon
9	DI. Kenalan	Kasihan
10	DI. Beji	Pajangan
12	DI. Sumberan	Kasihan
13	DI. Kadibeso	Jetis
14	DI. Mojo	Kretek
15	DI. Sikluwih	Kretek
16	DI. Siraman	Sewon
17	DI. Bibis Donoloyo	Banguntapan
18	DI. Dokaran	Sewon
19	DI. Guntur	Sewon
20	DI. Kepuh kulon	Banguntapan
21	DI. Ewon	Pandak
22	DI. Kadisono	Pajangan
23	DI. Klegen	Pundong
24	DI. Merdiko	Sewon
25	DI. Timbulsari	Sewon
26	DI. Canden Kiri	Imogiri
27	DI. Salakan	Banguntapan
28	DI. Tegal	Pundong



Gambar 12. Pemeliharaan saluran irigasi pada Daerah Irigasi Dokaran

- Pengelolaan bendung untuk penyediaan air irigasi bagi petani dilakukan pada 100 Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Bantul
- Pengelolaan dan kesiapsiagaan bendung air pada musim hujan pada :
 - Bendung Klegen
 - Bendung Mejing
 - Bendung Ketonggo Bibis



7.88

Da

3. Sasaran 3 : Meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat

Persentase kawasan kumuh Perkotaan yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2021 adalah 92,49% dari target akhir RPJMD yaitu 100%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2020 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Tabel 31. Capaian Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	92,49	100	92,49	92,49	100	92,49

Capaian indikator kinerja persentase Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani adalah 92,49% dari target 100% atau tercapai 92,49% atau

bernilai kinerja sangat tinggi. Capaian realisasi tahun 2021 sama dengan capaian realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,49%. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 92,49% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

1) Program Pengembangan Perumahan

Maksud program ini adalah untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Bantul. Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan, pengembangan perumahan, pembinaan pengelolaan rumah susun dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Anggaran Program Pengembangan Perumahan adalah sebesar Rp2.616.111.589,- dengan realisasi sebesar Rp2.463.446.775,- atau tercapai sebesar 94,16%.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan :

a) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan optimalisasi kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.333.966.349,- terealisasi sebesar Rp2.186.513.135,- atau tercapai 93,68%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk optimalisasi kinerja penatausahaan dan operasional UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permakaman. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp2.333.966.349,- terealisasi sebesar Rp2.186.513.135,- atau tercapai 93,68%. Keluaran dari subkegiatan ini adalah laporan hasil pengelolaan rusunawa pada 4 rusunawa.

Adapun uraian subkegiatan yang dilaksanakan berupa operasional UPTD RSP, pemeliharaan UPTD RSP dan semua fasilitas di dalamnya, pemeliharaan jaringan air limbah yang sudah tersambung ke IPAL Terpusat, dan sewa tanah kas Kalurahan Banguntapan, Ngestiharjo, Panggungharjo dan Tamanan.

Pada kegiatan ini dihasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sewa hunian Rusunawa dan retribusi pengolahan limbah cair dengan rincian seperti Tabel berikut :

Tabel 32 Pendapatan Asli Daerah dari Rusunawa dan Pengolahan Limbah Cair Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah PAD (Rp)	
		Retribusi Rusunawa	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	2017	1.329.898.200	108.009.500
2	2018	1.775.835.400	128.619.000
3	2019	1.824.933.500	134.362.500
4	2020	1.367.354.786	82.608.000
5	2021	1.588.443.500	138.288.300

b) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp282.145.240,- terealisasi sebesar Rp276.933.640,- atau tercapai 80,46%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik.

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp120.375.000,- dan terealisasi Rp157.532.740,- atau terealisasi sebesar 97,38%.

Target dan realisasi fisik dari sub kegiatan ini adalah laporan hasil pendataan PSU perumahan sebanyak 1 dokumen atau terealisasi 100%. Selain itu, dari sub kegiatan ini terdapat output berupa laporan rekomendasi rencana tapak (siteplan) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 15 dokumen dengan rincian seperti pada Tabel berikut :

Tabel 33 Data Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Perumahan (Siteplan) Tahun 2021

No	NAMA PENGEMBANG	ALAMAT	NAMA PERUMAHAN
1	PT. Devcorena CiPTa Grhatama	Kaligoro, Bawuran, Pleret, Bantul	Perum. Grahata Hills
2	PT. Reka Daya Kartika	Gunung Palo, Argorejo-Argodadi, Sedayu, Bantul	Perum. Graha Kartika Sedayu
3	PT. Maro Anugrah Jaya	Sambikerep, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Perum. Nawa Village Bangunjiwo
4	PT. Graha Wijaya Land	Kaliurang, Argomulyo, Sedayu, Bantul	Perum. Villa Argomulyo
5	PT. Jogja Graha Selaras	Joho, Jambidan, Banguntapan, Bantul	Perum. Royal Mansion
6	PT. Prestasi Investa Pratama	Kaliurang, Argomulyo, Sedayu, Bantul	Perum. Puri Permata Nirwana 7
7	PT. Roda Pembangunan Jaya	Plurugan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Perum. Taman Nirmala Asri
8	PT. Cita Prasada Mulia	Kepuhan Rt. 12, Argorejo, Sedayu, Bantul	Perum. Prasada Green Village
9	PT. Harmoni CiPTa Perkasa	Mantup, Baturetno, Banguntapan, Bantul	Perum. Harmoni Residence Baturetno
10	PT. Sinar Harapan Sarosa	Kersan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Perum. Pondok Kersan
11	PT. Darminto Baru Propertindo	Kepuh Wetan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Perum. Dm Village Wirokerten

12	PT. Bumi Purnama Raya	Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan	Perum. Kirana Garden Residence
13	PT. Sumber Global Properti	Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan	Perum. Pondok Permai Banguntapan 2
14	PT. Reka Daya Kartika	Gunung Palo, Argorejo-Argodadi, Sedayu, Bantul	Perum. Graha Kartika Sedayu
15	PT. Panca Sami Makmur	Dusun Ngentak Gendeng Bangen, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Perum. Permata Bangunjiwo Regency

Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) Perumahan yaitu Perumahan Puri Permata Nirwana 3 dari PT. Prestasi Investa Pratama yang telah melakukan proses pecah sertifikat fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) perumahan dan telah terbit sertifikat PSU dengan nomor HGB 00857 seluas 474 m².

Proses penyerahan PSU dari PT Prestasi Investa Pratama kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sudah dilakukan identifikasi dan verifikasi oleh tim dari Pemkab Bantul. Seluruh berkas penyerahan PSU kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sudah diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.



Gambar 13. Kegiatan Survei Lokasi Pengajuan Ijin Siteplan di Salah Satu Perumahan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dilaksanakan dalam rangka melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp161.770.240,- dan terealisasi Rp157.532.740,- atau terealisasi sebesar 97,38%.

Target dan realisasi fisik sub kegiatan ini adalah laporan hasil updating status jalan desa sebagai upaya dalam rangka pengendalian pembangunan dan pengembangan permukiman sebanyak 1 dokumen.

2) Program Kawasan Permukiman

Maksud program ini adalah untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan dan penataan permukiman di Kabupaten Bantul.

Sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Anggaran Program Pengembangan Permukiman adalah sebesar Rp2.866.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.790.377.500,- atau tercapai sebesar 97,36%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan optimalisasi kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.866.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.790.377.500,- atau tercapai sebesar 97,36%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Tujuan sub kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya bagi masyarakat kurang mampu. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp2.866.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.790.377.500,- atau tercapai sebesar 97,36%.

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi terhadap penerima manfaat bantuan stimulasi pembangunan rumah swadaya melalui sumber Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebesar 1.420 unit Rumah Tidak Layak Huni dientaskan menjadi Rumah Layak Huni dengan rincian seperti pada Tabel.

Tabel 34 Data Penanganan RTLH Tahun 2021

No.	Kapanewon	BSPS	DAK	PROPINSI		Total
				PK	PB	
1	Bambanglipuro	27		12	17	56
2	Banguntapan	32				32
3	Bantul	119		7		126
4	Dlingo	76		8	12	96
5	Imogiri	16		194	11	221
6	Jetis	46		1	7	54
7	Kasihan	135		5	1	141
8	Kretek	7			1	8
9	Pajangan	57		7		64
10	Pandak		60	8		68
11	Piyungan	58				58
12	Pleret	71	67	4		142
13	Pundong	14		3	4	21
14	Sanden			38		38
15	Sedayu	95		16		111
16	Sewon	172		2	1	175
17	Srandakan			9		9



Gambar 14. Salah satu Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Maksud dari program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air minum sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan aman.

Anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah sebesar Rp10.046.943.240,- dengan realisasi Rp9.785.308.240,- atau terealisasi 97,40%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait akses air minum. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp10.046.943.240,- dengan realisasi Rp9.785.308.240,- atau 97,40%. Target indicator dari kegiatan ini adalah 100% Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 (lima) subkegiatan yaitu :

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah data teknis air minum sebanyak 12 dokumen dengan realisasi sebesar 12 dokumen atau tercapai 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp62.670.240,- dengan realisasi Rp51.246.240,- atau terealisasi 81,77%.

2) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah meningkatkan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan perdesaan. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp3.565.223.000,- dengan realisasi Rp3.552.999.500,- atau tercapai sebesar 99,66%. Target keluaran dari sub kegiatan ini adalah 98 unit hibah PAMSIMAS dan 555 unit peningkatan SPAM Perdesaan melalui Dana Alokasi

Khusus. Realisasi yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah peningkatan jaringan pada SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan sebanyak 736 Sambungan Rumah (SR). Data peningkatan SR SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan Tahun 2021 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 35 Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021

No.	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	Peningkatan SPAM Dlingo	Dlingo	84
2	Peningkatan SPAM Guwosari	Pajangan	60
3	Peningkatan SPAM Poncosari	Srandakan	81
4	Peningkatan SPAM Sumbermulyo	Bambanglipuro	96
5	Peningkatan SPAM Triharjo	Pandak	185
6	Peningkatan SPAM Wukirsari	Imogiri	133
7	Pamsimas Reguler - Desa Bangunharjo	Sewon	49
8	Pamsimas Reguler - Desa Ringinharjo	Bantul	49



Gambar 15. Peningkatan SPAM di Kalurahan Triharjo

3) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah meningkatkan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perkotaan. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp5.574.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp5.378.432.500,- atau teralisasi sebesar 96,48%. Target keluaran dari sub kegiatan ini adalah perluasan Jaringan SPAM sebanyak 1.052 SR dan tercapai 100%. Data perluasan SR SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan Tahun 2021 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 36. Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	SPAM Bawuran	Pleret	500
2	SPAM Canden	Jetis	384
3	SPAM Tamanan	Banguntapan	128
4	SPAM Argodadi	Sedayu	40



Gambar 16. Pembangunan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Bawuran

4) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp106.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp67.917.500,- atau tercapai sebesar 63,86%. Target keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah 5 dokumen Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum, dengan realisasi sebanyak 5 dokumen atau tercapai 100%.

5) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah meningkatkan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perdesaan. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp738.200.000,- dengan realisasi Rp734.712.500,- atau terealisasi 99,53%. Target Keluaran

yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah peningkatan jaringan pada SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan ini adalah 250 unit SR Hibah Air Minum Perdesaan dan 40 unit SR Hibah Khusus Pamsimas. Realisasi subkegiatan ini berupa sebanyak 329 Sambungan Rumah (SR) pada 6 (enam) lokasi. Data peningkatan SR SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan Tahun 2021 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 37 Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	HAMP Girirejo	Imogiri	55
2	HAMP Panjangrejo	Piyungan	61
3	HAMP Patalan	Jetis	57
4	HAMP Srimulyo	Piyungan	53
5	HAMP Tirtosari	Kretek	63
6	HKP Sriharjo	Imogiri	40

4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Maksud program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem air limbah. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air limbah domestik sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah yang layak dan aman. Anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah sebesar Rp5.218.853.250,- dengan realisasi Rp5.144.623.000,- atau 98,58%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait akses air limbah. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp5.218.853.250,- dengan realisasi Rp5.144.623.000,- atau 98,58%. Target keluaran dari kegiatan ini adalah 100% Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dan tercapai sebesar 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah melakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp 51.120.240,- dan terealisasi sebesar Rp45.846.240,- atau tercapai 89,68%. Target keluaran berupa 12 dokumen Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah dan tercapai sebanyak 12 dokumen atau tercapai 100%.

- Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pembangunan/

rehabilitasi/peningkatan/perluasan SPALD -Terpusat. Pagu anggaran sebesar Rp273.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp244.441.000,- atau tercapai 89,42%. Target keluaran yang dihasilkan berupa laporan hasil supervise sebanyak 4 dokumen dan tercapai 4 dokumen atau terealisasi 100%.

- Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan SPALD. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp765.093.050,- dan terealisasi sebesar Rp740.527.800,- atau tercapai 96,79%. Target keluaran adalah 81 unit SR SPALD dan teralisasi sebanyak 85 SR di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan.
- Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan/penyediaan sub sitem pengolahan setempat atau tangka septic pribadi. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp1.714.925.000,- terealisasi sebesar Rp1.714.925.000,- atau tercapai 100%. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 100 unit Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dan 74 unit tanki septic terbangun. Realisasi keluaran adalah pembangunan tangki septic pribadi pada 6 (enam) lokasi sebanyak 184 unit. Data pembangunan tangki septic pribadi seperti pada Tabel berikut :

Tabel 38 Data Pembangunan Tangki Septik Pribadi Tahun 2021

No.	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	Tangki Septik Individu Triharjo	Pandak	84
2	HALS Argosari	Sedayu	20
3	HALS Kebonagung	Imogiri	20
4	HALS Sriharjo	Imogiri	20
5	HALS Sumberagung	Jetis	20
6	HALS Wukirsari	Imogiri	20



Gambar 17. Pembangunan Tangki Septik Individu di Paten, Sumberagung, Jetis

- Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp328.290.000,- terealisasi sebanyak Rp317.520.000,- atau tercapai 96,72%. Target dan keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah sebanyak 3 dokumen serta Hibah Uang kepada Sekber Kartamantul dalam rangka Kerjasama operasional SPALD-Terpusat Sewon sebesar Rp250.000.000,-.

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah optimalisasi kinerja dalam operasional dan pemeliharaan SPALD-Terpusat Bambanglipuro. Pagu anggaran sub kegiatan adalah Rp186.074.960,- dan terealisasi sebesar Rp181.362.960,- atau terealisasi sebesar 97,47%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil operasional SPALD-T Bambanglipuro sebanyak 3 dokumen atau tercapai 100%.

SPALD-T Bambanglipuro merupakan SPALD – T yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2020-2021. Aset SPALD ini belum diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, akan tetapi sudah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten

Bantul. Operasional telah dilaksanakan terhitung sejak Bulan Oktober 2021.

- Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan/penyediaan system pengelolaan air limbah domestik (SPALD-T) skala permukiman. Pagu anggaran sebesar Rp1.900.000.000,- terealisasi 100% atau Rp1.900.000.000,-. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Pembangunan SPALD-T dengan SR sebanyak 190, dan terealisasi sebanyak 256 unit. Data pembangunan SPALD-T skala permukiman seperti pada Tabel berikut :

Tabel 39 Data Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	SPALD-T Permukiman Bangunharjo	Sewon	57
2	SPALD-T Permukiman Poncosari	Srandakan	68
3	SPALD-T Permukiman Trimulyo	Jetis	68
4	SPALD-T Permukiman Trimurti	Srandakan	63



Gambar 18. Pembangunan SPALD-T Permukiman di Kapanewon Trimulyo



4. Sasaran 4 : Meningkatnya penanganan banjir

Persentase penanganan banjir

Topografi Kabupaten Bantul dengan bentukan alamnya secara alami menciptakan kawasan potensi banjir genangan maupun banjir luapan. Adanya aktifitas manusia yang mengubah alam mempunyai efek samping antara lain menghambat fungsi drainase sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Untuk mengetahui capaian untuk sasaran ini melalui indikator yaitu seberapa besar pengurangan luas potensi banjir. Apabila potensi luasan banjir makin berkurang maka mengindikasikan tercapainya sasaran ini. Capaian penanganan banjir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 40. Capaian Persentase Penanganan Banjir Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penanganan banjir	40,9	47,68	44,6	93,54	47,68	93,54

Capaian indikator kinerja persentase penanganan banjir adalah 44,6% dari target 47,68% atau tercapai 93,54% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 100% maka capaian tahun 2021 turun sebesar 6,46%%. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 47,68% maka capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 93,54% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase. Maksud dari program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan dan memperluas cakupan sistem drainase sehingga dapat memperlancar aliran air hujan dan tidak menyebabkan genangan. Anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah sebesar Rp3.262.138.165,- dengan realisasi Rp3.137.190.000,- atau 96,17%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase untuk mencegah terjadinya genangan air hujan. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp3.262.138.165,- dengan realisasi Rp3.137.190.000,- atau 96,17%. Target dan realisasi keluaran adalah 100% Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan atau tercapai 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah optimalisasi kinerja dalam operasional dan pemeliharaan system drianase. Pagu anggaran sebesar Rp119.999.065,- terealisasi sebanyak Rp118.571.000,- atau tercapai 98,81%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 15 unit drainase terpelihara. Data pemeliharaan drainase seperti pada Tabel berikut :

Tabel 41 Pemeliharaan Drainase Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon
1	Drainase Depan Kantor Kecamatan Banguntapan	Banguntapan
2	Drainase Timur Perempatan Ngipik	Banguntapan
3	Drainase Dsn. Piring, Mutigading	Sanden
4	Drainase Dsn Dahromo, Segoroyoso	Pleret
5	Drainase Dsn. Segoroyoso, Segoryoso	Pleret
6	Drainase Lap. Paseban, Komplek Gd. Parasamya	Bantul
7	Drainase Dsn. Sukun, Patalan	Jetis
8	Drainase Komplek Perkantoran Pemda II, Manding, Tirenggo	Bantul
9	Drainase Dsn . Mangiran, Trimurti	Srandakan
10	Drainase Lingkungan Pasar Celep, Srigading	Sanden
11	Drainase Dsn. Bejen, Bantul	Bantul
12	Drainase Jl. RA. Kartini, Jebugan	Bantul
13	Drainase Dsn. Ngebel, Tamantirto	Kasihan
14	Drainase Dsn. Kasongan, Tirtonirmolo	Kasihan
15	Drainase Komplek Psr Imogiri Baru	Imogiri



Gambar 19. Pemeliharaan Drainase Lapangan Paseban di Kapanewon Bantul

- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan sistem drainase lingkungan untuk kelancaran aliran air hujan sehingga tidak menyebabkan genangan. Pagu anggaran sebesar Rp3.142.139.100,- terealisasi sebesar Rp3.018.619.000,- atau tercapai 96,07%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah 20 unit drainase berhasil dibangun atau tercapai 100%. Data pembangunan sistem drainase lingkungan tersaji pada table berikut :

Tabel 42 Data pembangunan sistem drainase lingkungan Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Panjang (m)
1	Drainase Butuh Sriharjo Imogiri	Imogiri	172
2	Drainase Murtigading Sanden	Sanden	172
3	Drainase Singgelo Poncosari	Srandakan	193
4	Drainase Jatimulyo	Dlingo	144
5	Drainase Kedaton Kidul Pleret	Pleret	132
6	Drainase Kepanjen Jambidan	Banguntapan	144
7	Drainase Kepek Timbulharjo	Sewon	193
8	Drainase Piring Srihardono	Pundong	184
9	Drainase Rejodadi Ngestiharjo	Kasih	163
10	Drainase Sitimulyo	Piyungan	144
11	Drainase Tangkulan Sumbermulyo	Bambanglipuro	86
12	Drainase Tegalkembang Imogiri	Imogiri	163
13	Drainase Tegal Tamanan Tamanan	Banguntapan	163
14	Drainase Bibis Bangunjiwo	Kasih	128
15	Drainase Ponggok Pande	Jetis	85
16	Drainase Kanggotan Pleret	Pleret	193

Permasalahan :

Dari empat sasaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Akses jalan yang belum sepenuhnya mantap
2. Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah belum 100% baik
3. Belum semua lahan / daerah irigasi terlayani air irigasi dengan baik
4. Belum optimalnya akses air minum yang layak
5. Belum optimalnya akses sanitasi layak
6. Belum optimalnya penanganan banjir/genangan
7. Belum terpenuhinya tenaga terampil konstruksi bersertifikat
8. Masih adanya Kawasan kumuh yang belum tertangani
9. Masih terdapat backlog perumahan dan rumah tidak layak huni

Solusi

Dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, dilaksanakan berbagai upaya antara lain :

1. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan pada jalur jalan yang mengalami kerusakan
2. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung pemerintah
3. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
4. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan air minum
5. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan air limbah

6. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase
7. Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi
8. Meningkatkan sinergitas penanganan Kawasan kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya:

1. Menjaring aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang dibutuhkan.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada secara berkala dan berkesinambungan.
3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.
4. Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana peningkatan infrastruktur.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp.165.915.095.681,- yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.155.354.457.346,- atau sebesar 93,63%.

Alokasi anggaran Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	121.884.346.821	73,46
2	Meningkatnya kecukupan air irigasi	20.020.532.616	12,07
3	Meningkatnya penanganan banjir	3.262.138.165	1,97
4	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	20.748.078.079	12,51
Total belanja		165.915.095.681	100

Sumber : DPUPKP, 2021

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dengan besaran anggaran 73,46% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya penanganan banjir sebesar 1,97% dari total anggaran belanja.

Penyerapan belanja pada tahun 2021 sebesar 93,63% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani sebesar 97,28%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 92,53%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 97,28% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas

sarana dan prasarana publik menyerap anggaran terkecil yaitu 92,87% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 44 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	76,08	75,83	99,67	110.937.350.727	102.654.673.346	92,53
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	84	84,5	100,6	10.946.996.094	10.544.823.940	96,33
3	Persentase kecukupan air irigasi	83,16	81,05	97,46	20.020.532.616	18.834.014.545	94,07
4	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	100	92,49	92,49	20.748.078.079	20.183.755.515	97,28
5	Persentase penanganan banjir	47,68	44,6	93,54	3.262.138.165	3.137.190.000	96,17

Sumber : DPUPKP, 2021

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2021 sebesar 6,37%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 7,47%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani sebesar 2,72%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 7,13% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 2,72% dari anggaran target.

Efisiensi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 45. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	110.937.350.727	102.654.673.346	8.282.677.381	7,47
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	10.946.996.094	10.544.823.940	402.172.154	3,67
3	Persentase kecukupan air irigasi	20.020.532.616	18.834.014.545	1.186.518.071	5,93
4	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	3.262.138.165	3.137.190.000	564.322.564	2,72
5	Persentase penanganan banjir	20.748.078.079	20.183.755.515	124.948.165	3,83
Jumlah		165.915.095.681	155.354.457.346	10.560.638.335	6,37

Sumber : DPUPKP, 2021

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak empat sasaran, lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target atau rata-rata tercapai sebesar 96,71% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

